

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA (Pencapaian *Outcome*)

Pada tahun 2025, BKD Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU):

**Tabel 3.1 Indikator Kinerja SKPD
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel
Berdasarkan RENSTRA 2025 (Triwulan IV)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	Nilai	81	84,13	103.86
		Nilai NSPK	Nilai	90	88,55	98,38
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	692,06	692.06
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	16,61	138.42
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	81,25	102.06
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	90,36	100.4

**Tabel 3.2 Pencapaian Target Capaian Indikator
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Triwulan IV)**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Tar get	Realisa si	Tar get	Realisa si	Tar get	Realisa si	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	692,06	692.06	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,21	9	15,27	12	16,61	138.42	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	80	81,25	102.06	Telah sesuai target

B. ANALISIS ATAS REALISASI CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025 INDIKATOR KINERJA SKPD DENGAN PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3 Analisis Raslisasi Capaian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	1. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	%	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	67	67,14	100	76	81,36	100	81	84,13	103,86	Telah sesuai target
			Nilai NSPK	%	Nilai NSPK Prov. Sumsel dari BKN		65,47		71	94,375	100	90	88,55	98,38	Tahun 2025 Nilai NSPK Prov. Sumsel bernilai 88,55 dengan Predikat A (Unggul)
		2. Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	613,86	100	100	636,65	100	100	692,06	692,06	Telah sesuai target
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,46	14,21	100	9	15,27	100	12	16,61	138,42	Telah sesuai target
			Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	100	100	100	100	80	81,25	102,06	Telah sesuai target
		3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	87	90,92	100	88	90,52	100	90	90,36	100,4	Telah sesuai target

C. PENJABARAN ANALISA CAPAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2025

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel.

Indikator Kinerja 1: Nilai Indeks IP ASN Prov. Sumsel.

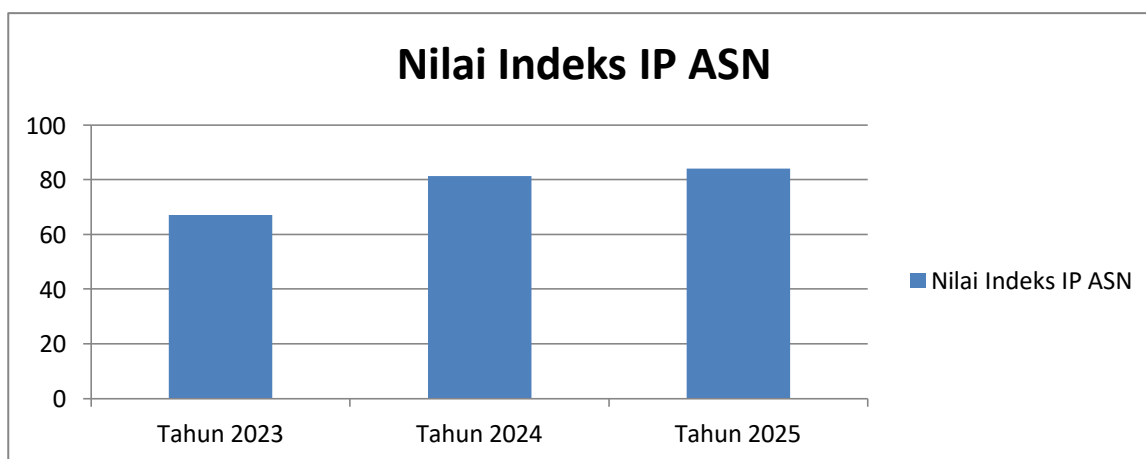
Indikator Sasaran Kinerja: Untuk target nilai Indeks IP ASN pada tahun 2025 adalah sebesar 81, sampai dengan Triwulan IV nilai IP ASN sebesar 84,13 atau dengan capaian 103,86%.

Adapun perbandingan Nilai Indeks IP ASN pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Nilai Indeks IP ASN
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai Indeks IP ASN Prov Sumsel	%	67	67,14	76	81,36	81	84,13	103,86	Telah sesuai target

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Nilai IP ASN



Realisasi Nilai Indeks IP ASN pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 67,14 kemudian pada tahun 2024 sebesar 81,36 dan pada tahun 2025 sebesar 84,13.

Nilai IP ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebesar 84,13 atau berada pada rentang **81–90 (Kategori Tinggi)**. Angka ini merupakan hasil akselerasi masif melalui pemutakhiran data mandiri di MyASN BKN dan aplikasi internal **PIP BKD Provinsi Sumsel**.

Adapun keunggulan dan kelemahan Sumsel dibandingkan provinsi lain dapat dilihat dari empat dimensi pembentuk IP ASN:

✓ **Dimensi Kinerja (Bobot 30%):**

Sumsel sangat kompetitif di dimensi ini. Integrasi system **e-Kinerja** yang dikunci dengan pembayaran TPP membuat tingkat kepatuhan input kinerja di Sumsel lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi yang belum menerapkan sistem *reward & punishment* yang ketat.

✓ **Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%):**

Berada pada level rata-rata nasional. Tantangan Sumsel terletak pada distribusi ASN dengan tingkat pendidikan S2/S3 yang masih terpusat di dinas-dinas tertentu, sementara provinsi seperti Jawa Barat atau Jawa Timur memiliki sebaran yang lebih merata.

✓ **Dimensi Kompetensi (Bobot 40%):**

Ini merupakan dimensi dengan skor paling fluktuatif. Sumsel terus mengejar ketertinggalan untuk memastikan setiap ASN mendapatkan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Di provinsi dengan kategori "Sangat Tinggi", akses ke pelatihan digital sudah lebih mapan.

✓ **Dimensi Disiplin (Bobot 5%):**

Skor Sumsel hampir sempurna (mendekati 5), selaras dengan provinsi-provinsi unggulan lainnya, karena sistem absensi elektronik yang sudah terintegrasi.

Indikator Kinerja 2: Nilai NSPK Prov. Sumsel.

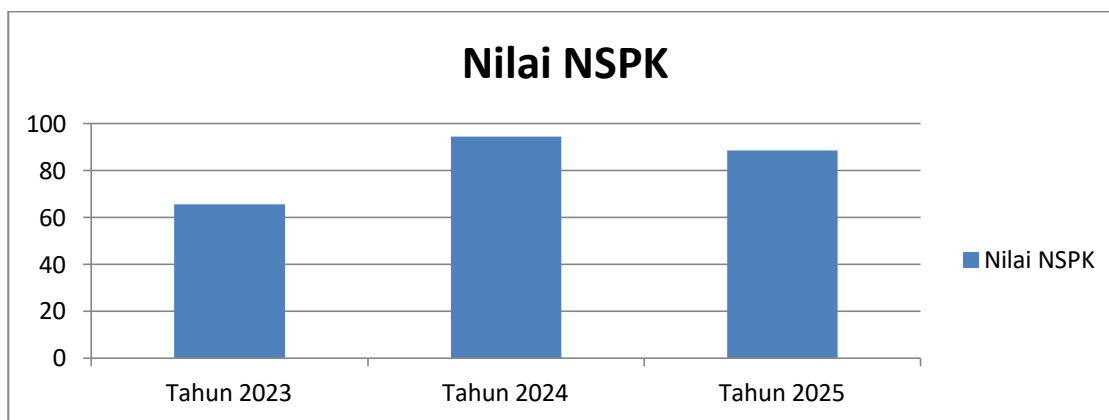
Indikator Sasaran Kinerja: Untuk target nilai NSPK pada tahun 2025 adalah sebesar 90, sampai dengan Triwulan IV nilai NSPK sebesar 88,55 atau dengan capaian 98,38 dengan Predikat A (Unggul).

Adapun perbandingan Nilai NSPK pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Nilai NSPK
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai NSPK	%		65,47	71	94,375	90	88,55	98,38	Tahun 2025 Nilai NSPK Prov.Sumsel bernilai 88,55 dengan Predikat A (Unggul)

Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Nilai NSPK



Realisasi Nilai NSPK pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami naik turun dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 65,47 kemudian pada tahun 2024 sebesar 90,375 dan pada tahun 2025 sebesar 88,55.

Penilaian NSPK mencakup 18 elemen kunci. Di tahun 2025, Sumatera Selatan berfokus pada penguatan elemen yang sebelumnya menjadi titik lemah:

➤ **Penyusunan & Penetapan Kebutuhan:**

Sumsel mendapatkan nilai tinggi karena sinkronisasi data kebutuhan ASN dengan aplikasi SIASN BKN yang sudah mencapai 100%.

➤ **Pengembangan Karier & Pola Karier:**

Ini menjadi fokus utama tahun 2025. Pemprov Sumsel didorong oleh BKN untuk memperkuat regulasi lokal (seperti Perda/Pergub Pola Karier) agar selaras dengan Permenpan RB Nomor 21.

➤ **Disiplin & Pemberhentian:**

Implementasi aplikasi **I-DIS (Integrated Discipline)** secara penuh di tahun 2025 memberikan tambahan poin signifikan. Kasus-kasus pelanggaran disiplin kini terekam secara real-time dan terintegrasi dengan pusat.

Secara keseluruhan, Manajemen ASN di Sumatera Selatan tahun 2025 telah beralih dari sekadar kepatuhan administratif ke **pengelolaan berbasis merit yang terdigitalisasi**. Keberhasilan mencapai nilai di atas 85 (Unggul) akan memberikan dampak langsung berupa kemudahan dalam proses mutasi, kenaikan pangkat, dan pemberian penghargaan (*award*).

Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel.

Indikator Kinerja 1: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Indikator Sasaran Kinerja: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2025 targetnya tetap sama dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 692,06% atau dengan capaian 100%.

1) Capaian Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian sasaran kinerja ini dihitung dan dinilai dari perbandingan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan (PT) ke atas berbanding dengan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan SMA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) diluar PNS Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT lainnya, JFU dan Struktural

3) Capaian indikator kinerja ini adalah:

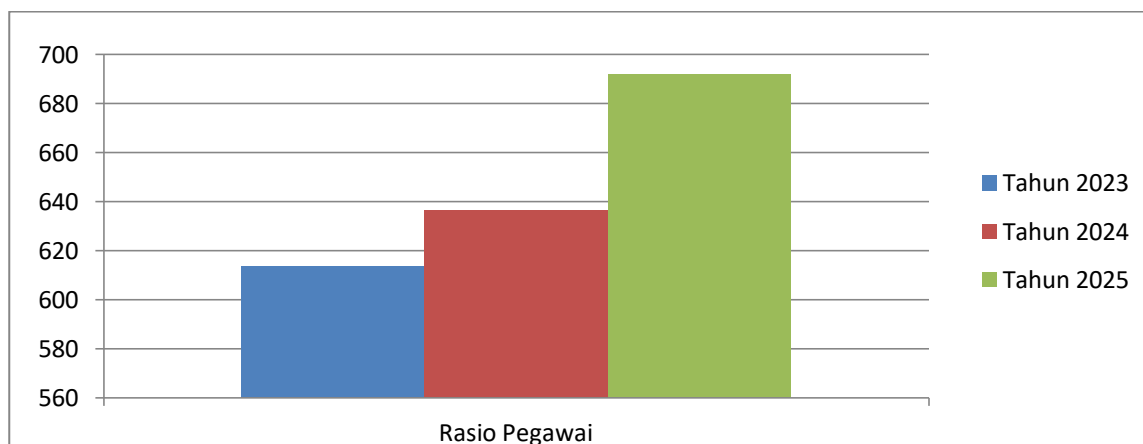
$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{pegawai dengan pendidikan SMA kebawah}} \times 100\% \text{ Seluruh jumlah} \\ &= \frac{4.097}{592} \times 100\% \\ &= \mathbf{692,06\%} \\ &= \text{Capaian Kinerjanya } 692,06\% / 100\% = \mathbf{692,06\%} \end{aligned}$$

Adapun perbandingan Rasio pegawai pendidikan tinggi menengah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	613,86	100	636,65	100	692,06	692,06	Telah mencapai target

**Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah
Dari Tahun 2023-2025**



Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 613,86 kemudian pada tahun 2024 sebesar 636,65 dan pada tahun 2025 sebesar 692,06.

Indikator Kinerja 2: Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Indikator Sasaran Kinerja: Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2025 sebesar 12% dengan realisasi 16,61% dan capaian realisasi 100% .

- 1) Capaian indikator kinerja pada tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut : Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 12%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Jumlah Pegawai (PNS) yang Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai (PNS) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- 2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dan lain-lain.
- 3) Capaian indikator kinerja ini adalah:

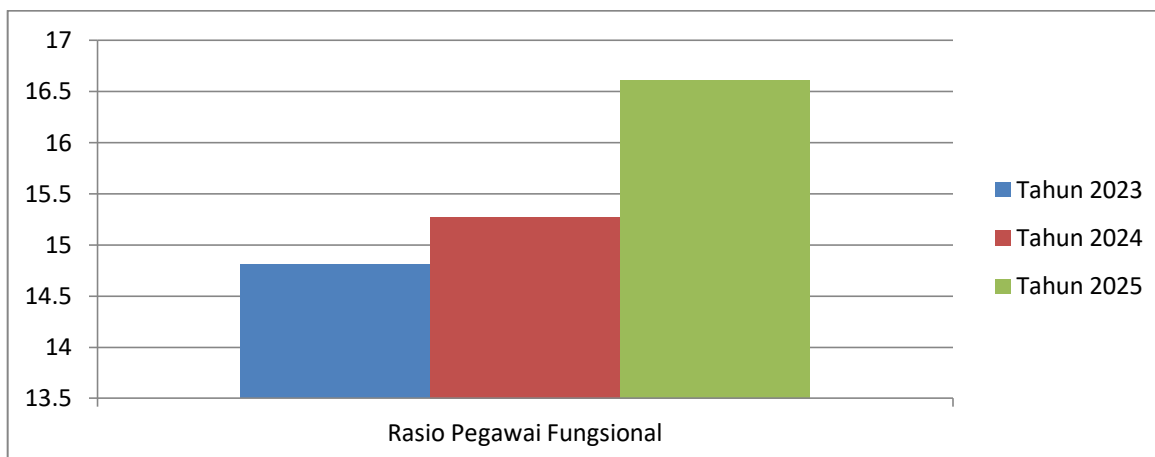
$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional} \\
 & \text{(di luar Guru dan Tenaga} \\
 & \text{Kesehatan)} \\
 & = \frac{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah}}{\text{(PNS tidak termasuk Guru dan} \\
 & \text{Tenaga Kesehatan)}} \times 100\% \\
 & = \frac{779}{4.689} \times 100\% \\
 & = 16,61\% \\
 & = \text{Capaian Kinerjanya } 16,61\% / 12\% = \mathbf{138,42\%}
 \end{aligned}$$

Adapun perbandingan Rasio pegawai fungsional pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Fungsional
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenagakesehatan)	%	9,46	14,81	9	15,27	12	16,61	138,42	Telah mencapai target

**Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Rasio Pegawai Fungsional
Dari Tahun 2023-2025**



Rasio pegawai fungsional pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 14,81 kemudian pada tahun 2024 sebesar 15,27 dan pada tahun 2025 sebesar 16.61.

Indikator Kinerja 3: Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Indikator Sasaran Kinerja: Target Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 81,25% dan capaian realisasi 100% .

- 1) Capaian indikator kinerja pada tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut : Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi 81,25% dan capaian realisasi 100%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- 2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) yang Bersertifikat Kompetensi (diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan).
- 3) Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{633}{779} \times 100\%$$

$$= 81,25\%$$

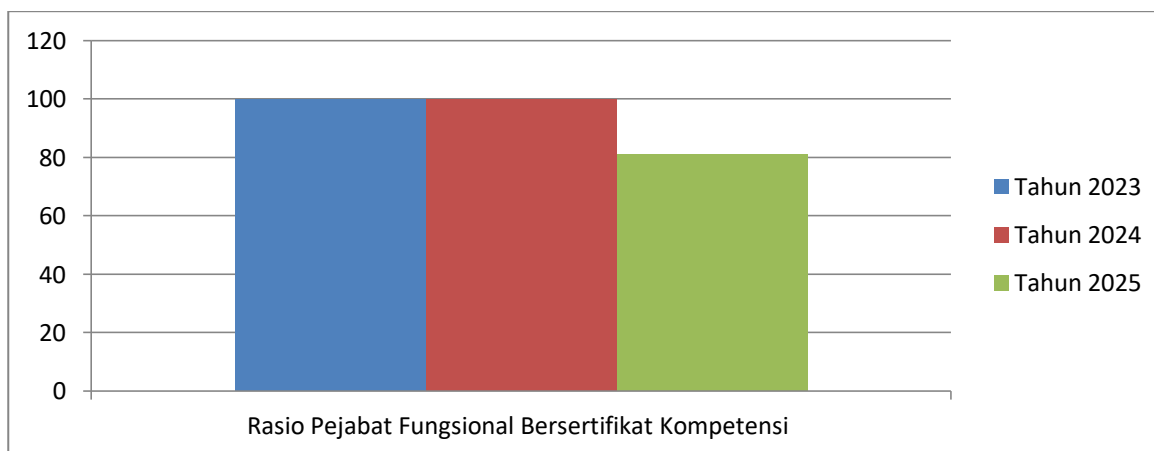
$$= \text{Capaian Kinerjanya } 81,25\% / 100\% = 102,06\%$$

Adapun perbandingan Rasio pejabat fungsional bersertifikat kompetensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi Dari Tahun 2023-2025

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	80	81,25	102,06	Telah mencapai target

Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi Dari Tahun 2023-2025



Rasio pejabat fungsional bersertifikat kompetensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 100%. Realisasi ini bisa mencapai 100% dikarenakan jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi berbanding lurus dengan jumlah seluruh Pegawai Fungsional, pada tahun 2023, jumlah Pegawai Fungsional

yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 805 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 805. Pada tahun 2024, jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 746 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 746. Namun pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional tidak berbanding lurus, jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 633 dan jumlah seluruh Pegawai Fungsional berjumlah 779, maka dari itu realisasinya sebesar 81,25 akan tetapi realisasinya tetap 100 % karena target di Tahun 2025 ini sebesar 80%.

Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian. Indikator Kinerja: Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian.

Indikator Sasaran Kinerja Utama: Target Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Tahun 2025 adalah 90 dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 90,36 atau capaian 100%.

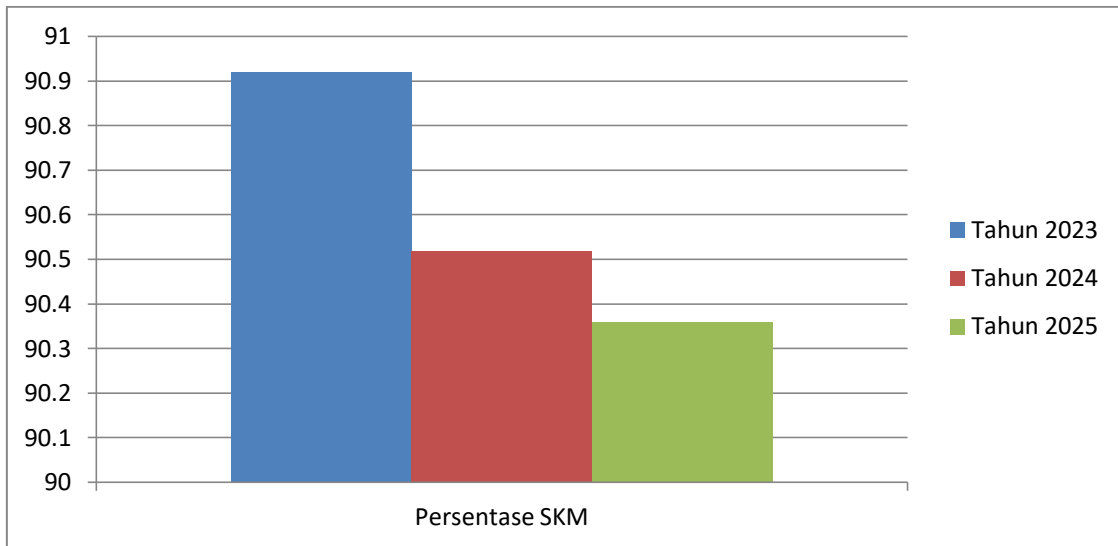
Persentase Survey Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu mencapai target dari tahun 2023 sampai dengan 2025 seperti gambar diatas. Pada tahun 2023 sebesar 90,92 kemudian pada tahun 2024 sebesar 90,52 dan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV ini sebesar 90,36.

Adapun perbandingan persentase Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat
Dari Tahun 2023-2025**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	87	90,92	88	90,52	90	90,36	100.4	Telah mencapai target yang ditetapkan

**Gambar 3.6 Perbandingan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat
Dari Tahun 2023-2025**



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang sangat positif sebesar 90,36 dengan predikat **"Sangat Baik"**.

Capaian ini tidak lepas dari transformasi layanan kepegawaian dari sistem manual ke digitalisasi penuh (paperless). Berikut adalah analisis mendalam atas capaian tersebut:

Pencapaian nilai "Sangat Baik" ini dipicu oleh tiga inovasi besar:

1. **Penerapan Manajemen Talenta:** BKD Sumsel menjadi instansi daerah pertama di wilayah Kanreg VII BKN yang menerapkan Manajemen Talenta secara penuh, meminimalkan subjektivitas dalam promosi jabatan.
2. **Digitalisasi Layanan (Paperless):** Pengurangan penggunaan berkas fisik hingga 90% melalui aplikasi MyASN yang terintegrasi, yang secara otomatis meningkatkan nilai pada unsur "Kemudahan Prosedur".
3. **Sistem Pengaduan Real-time:** Respon cepat terhadap keluhan ASN melalui sistem tiket yang terpantau langsung oleh pimpinan BKD, mengurangi tingkat ketidakpuasan pada aspek "Penanganan Pengaduan".

Perbandingan Capaian Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel di bawah ini merangkum posisi kinerja BKD Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Jangka Menengah (Akhir Renstra)	Realisasi s.d. Tahun 2025	Capaian terhadap Target Akhir (%)	Status
1	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	81	84,13	103,86%	Melampaui
	Nilai NSPK	90	88,55	98%	On Track
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	692,06	692%	Melampaui
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12	16,61	138%	Melampaui
	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80	81,25	102%	Melampaui
3	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	90	90,36	100,40%	Melampaui

Analisis Capaian Target Jangka Menengah (Renstra)

Hingga tahun 2025, BKD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan performa yang sangat impresif, di mana mayoritas indikator kinerja utama telah melampaui target akhir periode perencanaan (Renstra).

1. Akselerasi Profesionalitas dan Kompetensi

- **IP ASN (103,86%):** Keberhasilan melampaui target IP ASN di angka **84,13** menunjukkan bahwa upaya BKD dalam mendorong ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi (minimal 20 JP/tahun) dan pemutakhiran data mandiri berjalan efektif.
- **Rasio Pendidikan dan Sertifikasi:** Lonjakan drastis pada rasio pendidikan (692%) dan rasio fungsional (138%) mencerminkan keberhasilan kebijakan **Penyederhanaan Birokrasi**, di mana banyak jabatan struktural dialihkan ke fungsional, serta meningkatnya minat ASN dalam menempuh pendidikan tinggi melalui skema tugas/izin belajar.
- **Sertifikasi Kompetensi:** Dengan capaian **81,25**, BKD telah memastikan bahwa transisi ke jabatan fungsional tidak hanya sekadar perpindahan nomenklatur, tetapi dibarengi dengan kualitas yang tersertifikasi.

2. Kepatuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

- **Analisis Gap (98%):** Nilai NSPK merupakan satu-satunya indikator yang masih berstatus *On Track*. Meskipun sudah mendekati target (88,55 dari target 90), terdapat selisih **1,45 poin** yang harus dikejar.
- **Rekomendasi:** Fokus pada penyempurnaan dokumen administrasi kepegawaian secara digital dan penguatan pengawasan internal dalam pengangkatan jabatan agar selaras 100% dengan standar BKN.

3. Kualitas Layanan Publik

- **Kepuasan Masyarakat (100,40%):** Tercapainya target kepuasan masyarakat di angka **90,36** membuktikan bahwa digitalisasi layanan (seperti sistem kenaikan pangkat otomatis atau pensiun tepat waktu) telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh ASN dan stakeholder terkait di Sumatera Selatan.

Hambatan dalam Mencapai Target Jangka Menengah

- **Dinamika Regulasi Pusat:** Perubahan kebijakan terkait status Tenaga Non-ASN (Honorar) seringkali menyita sumber daya operasional yang seharusnya fokus pada pengembangan kompetensi ASN permanen.
- **Integrasi Data:** Meskipun sudah terintegrasi dengan SIASN BKN, sinkronisasi data antar instansi pusat dan daerah terkadang mengalami kendala teknis (sinkronisasi *real-time*).

Analisis Mendalam Berdasarkan Parameter Nasional

A. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Capaian IP ASN Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional. Keunggulan ini dipicu oleh:

- **Dimensi Kualifikasi:** Persentase ASN dengan tingkat pendidikan sesuai standar jabatan lebih tinggi dibanding rata-rata daerah lain di Indonesia.
- **Dimensi Kompetensi:** Masifnya penggunaan *Learning Management System* (LMS) yang memungkinkan ASN Sumsel memenuhi 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun secara mandiri dan efisien.

Faktor Determinan Keberhasilan BKD Sumsel

1. **Akselerasi Digital:** Penggunaan aplikasi "SIMPEG Sumsel" yang terintegrasi langsung ke pusat meminimalisir data anomali.
2. **Kepatuhan Pelaporan:** Tingkat kedisiplinan ASN Sumsel dalam memperbarui data mandiri (MyASN) mencapai angka di atas 95%.

B. Implementasi Sistem Merit

BKD Prov. Sumsel berhasil mempertahankan predikat "**Sangat Baik**" dalam implementasi Sistem Merit. Secara nasional, masih banyak instansi daerah yang berada pada level "Baik" atau "Kurang". Keberhasilan Sumsel terletak pada akurasi instrumen seleksi terbuka (open bidding) dan manajemen talenta (*talent pool*) yang sudah terintegrasi secara digital.

D. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Dari 2 (dua) program yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah mendapat alokasi dana APBD sebesar **Rp 20.016.944.846,- (dua puluh milyar enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)**, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 20.016.944.846,- (dua puluh milyar enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Dari alokasi Belanja di atas, sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 18.932.219.080,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah)** atau sebesar **94,58%** dengan **realisasi fisik sebesar 100,00%**. yang selanjutnya dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Fisik dan Keuangan

NO	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
I	Total Belanja Daerah	20.016.944.846	18.932.219.080	94.58	100.00
	Belanja Operasi	20.016.944.846	18.932.219.080	94.58	100.00
	a. Belanja Pegawai	14.432.591.000	14.151.866.563	98.05	100.00
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.673.000	6.058.675.216	98.36	100.00
	- Belanja Pegawai Lainnya	8.272.918.000	8.093.191.347	97.83	100.00
	b. Belanja Barang/Jasa	5.584.353.846	4.780.352.517	85.60	100.00
II	Belanja Modal	-	-	-	-

1) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar **Rp. 18.932.219.080,-** atau **94,58%** dan realisasi fisik **100,00%**.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp. **18.932.219.080,-** atau **94,58%** dan realisasi fisik **100,00%**.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp.0,- atau **0%** dan realisasi fisik **0%**. Tahun 2025 memang tidak terdapat Belanja Modal karena mengalami efisiensi.

Berikut ini kami sampaikan pencapaian output berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2025, sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan 3 subkegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 0- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah mengikuti rapat pembahasan Renja TA 2026 di Bappeda, Menghadiri Rapat Orientasi Penyusunan RPJMD Prov. Sumsel dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 di Aula Dapunta Hyang Bappeda, Mengikuti Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 melalui Zoom Meeting, Menelaah/ Meneliti/ Menyusun draft Renstra PD 2025-2029 sesuai pedoman RPJMD, Menyusun Renstra sesuai RPJMD 2025-2-29, Penyusunan RKPD Tahun 2026.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 0- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah Menelaah/ Meneliti dan Merinci pemotongan anggaran untuk pengurangan perjalanan dinas -50% TA 2025, Membuat tabel untuk efisiensi anggaran TA 2025, Telah Menyelesaikan DPA Refocussing Efisiensi, Menyusun DPA Perubahan Tahun 2025, Melakukan penyesuaian anggaran tahun 2026.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.130.000- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.205.170,- atau 92,91% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah Tersusunnya Lap Bulan Des 2024 dan Lap Bulan Jan-Des 2025, tersusunnya Lap TW I s.d III 2025, tersusunnya LKJIP TW I s.d III Tahun 2025, tersusunnya Lap TW IV 2024, tersusunnya LPPD, LKPJ, dan LKJiP.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 subkegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.432.591.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.151.866.563,- atau 98,05% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah dibayarkan Gaji pegawai bulan Jan-Desember 2025 sebanyak 68 Pegawai PNS dan 4 Pegawai PPPK termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja s.d.Desember 2025 dan THR dan gaji 13 dan 14.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 289.920.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 207.627.500,- atau 71,62% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah terealisasinya transaksi keuangan untuk bulan Januari s.d Desember 2025.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 subkegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 155.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 136.130.400,- atau 87,83% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta atributnya.

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 91.010.254,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.286.000,- atau 78,33% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah mengirim Pejabat Pengawas untuk mengikuti Diklat PKP sebanyak 2 Org, Diklat Kepegawaian 5 Org dan Diklat Bendahara 2 Org, Diklat Kepegawaian 5 orang, Diklat Public Speaking 2 orang dan workshop AI 2 orang.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat, untuk kegiatan yang bersifat seremonial untuk tidak dilaksanakan.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 subkegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.196.460,- atau 97,11% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 242.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 240.612.549,- atau 99,43% dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya bahan logistic kantor.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 163.001.860,- atau 98,79 % dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tersedianya penggandaan, dan pembuatan Spanduk/Banner/Brosur/Dokumentasi dan bahan cetak.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.100.000,- atau 93,28% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah Tersedianya bahan bacaan untuk Eselon II dan III untuk bulan Januari s.d Desember 2025.

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 212.933.135,- atau 96,79 % dan capaian realisasi fisik 100,00 %, dengan alokasi dana tersebut telah dilakukan perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi dan tersedianyan makan/minum rapat sampai dengan desember 2025.

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,- atau 56,47 % dan capaian realisasi fisik 100,00% dengan alokasi dana tersebut telah dilakukan sosialisasi arsip dinamis.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 subkegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

b. Pengadaan Mebel

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan di efisiensi sesuai arahan pusat.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 subkegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.921.519,- atau 98,04% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut telah terealisasi

penyediaan jasa surat menyurat (materai)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 380.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 314.118.402,- atau 82,66% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkan tagihan Telepon, Listrik, Air dan Internet kantor dan rumah dinas s.d. bulan Desember 2025.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 642.787.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 581.988.032,- atau 90,54% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkan Jasa Tenaga Honor/Non ASN yang bekerja di BKD Prov. Sumsel sebanyak 3 org dan Jasa Tenaga Kebersihan Agustus dan Jasa Tenaga Keamanan sd bulan Desember 2025.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 subkegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 282.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 270.220.538,- atau 95,82% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah tersedia BBM untuk kendaraan dinas bulan Juli 2025 dan telah tersedia BBM untuk kendaraan dinas bulan Desember 2025 dan telah dibayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.373.150,- atau 98,21% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah dibayarkannya servis peralatan dan mesin lainnya yaitu servis AC, komputer, printer dan CCTV dan Kamera sebanyak 28 unit.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 370.944.284,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 354.437.237,- atau 95,55% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut telah terealisasinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

B. Program Kepegawaian Daerah

Pada program ini didukung oleh 4 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan 3 subkegiatan:

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 256.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 237.695.320,- atau 92,85% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut telah dilakukan Pengumuman pra sanggah hasil SKB dan Integarisi nilai SKD CPNS formasi 2024, Pengumuman pasca sanggah hasil SKB dan Integarisi nilai SKD CPNS formasi 2024, Pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK GURU TAHAP 1, Verivikasi seleksi administrasil PPPK TAHAP 2 formasi 2024, Pemberkasan CPNS formasi 2024, Pemberkasan PPPK TAHAP 1 formasi 2024 Penyampaian usul NI PPPK Nakes TAHAP 1 formasi 2024, Penyampaian usul NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 formasi 2024, Penyampaian usul NIP CPNS formasi 2024 Pembuatan SK CPPPK DAN SPRP TAHAP 1 formasi 2024, Pembuatan SPRP CPNS formasi 2024 Pembuatan SK CPNS formasi 2024, penyampaian NI PPPK Guru Tahap I, rekapitulasi dan penyampaian sisa tenaga honorer yang akan di usulan menjadi PPPK Paruh Waktu, tanda tangan SPK PPPK Tahap 1, Pemberkasan PPPK Tahap 2, Pembuatan SK dan SPK Paruh Waktu, Peresmian PPPK Paruh Waktu.

- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 128.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.115.999.976,- atau 90,62% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah terselesainya Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Musi Rawas, Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Polisi Pamong Praja, Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri MUBA,Fasilitasi penerbitan SK pergantian jabatan dan

personalia PAW DP Korpri Pali, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Oku Selatan, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri SETDA, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Dispora, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri BPBD, Fasilitas penerbitan SK pergantian jabatan dan personalia PAW DP Korpri Dukcapil, terselesainya 1. Penerbitan Tugas Belajar Mandiri sebanyak 172 SK , 2.Penerbitan izin cuti sebanyak 83 formulir..

- **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 153.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.204.800,- atau 95,74% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dengan alokasi dana tersebut telah tercapainya peremajaan Data ASN sebanyak 11.021 dokumen.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sejauh ini belum ada kendala yang berarti

2) Solusi

-

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan 2 subkegiatan:

- **Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.621.808,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.820.420,- atau 82,62% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terselesainya Administrasi KP ASN Prov.Sumsel Periode Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, November, Desember 2025 dan sedang proses UKP Periode Januari 2026) serta terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS dan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS melalui Metode Computer Assisted Test (CAT) BKN di SMA N.1 Kayu Agung (14 Oktober 2025) dan SMA Negeri 3 Prabumulih (16 Oktober 2025).

- **Pengelolaan Promosi ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.755.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.315.546.542,- atau 74,93% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terselesainya Rotasi, Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 187 Jabatan, terselesainya Surat PLT/Harian Sebayak 70 Surat, terselesainya SK Tim TGUPP sebanyak 30 SK, Terlaksananya Asesment Untuk JPTP sebanyak 27 Orang.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan 2 subkegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 213.220.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 197.073.829,- atau 92,43% dan capaian realisasi fisik 100,00% dari alokasi dana tersebut s.d bulan Desember ada 45 orang yang mengikuti tubel, dengan menggunakan dana APBD (6 orang) dana APBN (25 orang) dan biaya mandiri (14 orang), telah terlaksananya pembayaran SPP dan uang buku semester I dan II, terlaksananya monitoring tugas belajar di Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia, Terlaksananya pemetaan pengembangan Kompetensi, Tersusunnya program diklat ASN/Pelatihan dan Tersedianya draft Pergub tentang program magang, coaching dan mentoring.

- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.272.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.773.355,- atau 76,76% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah memproses SK Kenaikan Pejabat Fungsional sebanyak 550 SK, SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing sebanyak 30 SK, SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan jabatan sebanyak 104 SK, SK Alih Jenjang dalam Jabatan Fungsional sebanyak 10 SK, SK Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional sebanyak 6 SK dan SK Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional sebanyak 46 SK.

Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

2) Solusi

-

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan 3 subkegiatan:

- **Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.190.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.240.283,- atau 93,75% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terevaluasinya penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel sebanyak 13.755 pegawai yang bernilai baik (sesuai ekspektasi) dan 24 pegawai yang tidak mempunyai produktivitas kerja (tanpa capaian).

- **Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.917.832,- atau 97,91% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terbit Keppres Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebanyak 286 orang

- **Pembinaan Disiplin ASN**

Untuk mendukung kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.157.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.728.208,- atau 96,97% dan capaian realisasi fisik 100,00%, dari alokasi dana tersebut telah terlaksananya penanganan pelaporan LHKPN tahun 2024 sebanyak 647 Wajib Lapor, terlaksananya pembinaan disiplin dengan diterbitkannya SK Hukuman Disiplin dan SK Izin cerai.

Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sejauh ini belum ada kendala yang berarti.

- 2) Solusi

-

Adapun Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 Triwulan IV berdasarkan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	17,372,532,538	16,796,218,515	96.68	100.00
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,130,000	25,205,170	92.91	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	0.00	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	-	0.00	100.00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,130,000	25,205,170	92.91	100.00
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,722,511,000	14,359,494,063	97.53	100.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,432,591,000	14,151,866,563	98.05	100.00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	289,920,000	207,627,500	71.62	100.00
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246,010,254	207,416,400	84.31	100.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155,000,000	136,130,400	87.83	100.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,010,254	71,286,000	78.33	100.00
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662,150,000	645,044,004	97.42	100.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,500,000	10,196,460	97.11	100.00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242,000,000	240,612,549	99.43	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165,000,000	163,001,860	98.79	100.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,900,000	11,100,000	93.28	100.00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	-	0.00	100.00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220,000,000	212,933,135	96.79	100.00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,750,000	7,200,000	56.47	100.00
05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-	0.00	-
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	-	0.00	0.00
2	Pengadaan Mebel	0	-	0.00	0.00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	0.00	0.00
06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,026,787,000	900,027,953	87.65	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	3,921,519	98.04	100.00

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380,000,000	314,118,402	82.66	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642,787,000	581,988,032	90.54	100.00
07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687,944,284	659,030,925	95.80	100.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282,000,000	270,220,538	95.82	100.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000	34,373,150	98.21	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	370,944,284	354,437,237	95.55	100.00
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,644,412,308	2,136,000,565	80.77	100.00
08	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	537,750,000	500,900,096	93.15	100.00
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	256,000,000	237,695,320	92.85	100.00
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	128,000,000	115,999,976	90.62	100.00
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	153,750,000	147,204,800	95.74	100.00
09	Mutasi dan Promosi ASN	1,783,221,808	1,338,366,962	75.05	100.00
1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27,621,808	22,820,420	82.62	100.00
2	Pengelolaan Promosi ASN	1,755,600,000	1,315,546,542	74.93	100.00
10	Pengembangan Kompetensi ASN	245,492,500	221,847,184	90.37	100.00
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	213,220,000	197,073,829	92.43	100.00
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32,272,500	24,773,355	76.76	100.00
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77,948,000	74,886,323	96.07	100.00
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31,190,500	29,240,283	93.75	100.00
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	32,600,000	31,917,832	97.91	100.00
3	Pembinaan Disiplin ASN	14,157,500	13,728,208	96.97	100.00
TOTAL		20,016,944,846	18,932,219,080	94.58	100.00

Berdasarkan data di atas, analisis efisiensi BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Tingkat Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, BKD Provinsi Sumatera Selatan berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar **Rp 1.084.725.766** atau **5,42%** dari total pagu. Sisa anggaran ini merupakan hasil dari efisiensi belanja operasional dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

B. Keselarasan Kinerja dan Keuangan

Terdapat angka yang sangat presisi dan selaras antara realisasi keuangan (**94,58%**) dengan capaian kinerja fisik (**94,58%**). Hal ini menunjukkan:

1. **Akuntabilitas Tinggi:** Penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan.

2. **Efisiensi Terukur:** Setiap rupiah yang dikeluarkan berbanding lurus dengan kemajuan kinerja yang dicapai. Dengan rasio efisiensi sebesar **1,00**, BKD Provinsi Sumatera Selatan berada pada kategori "**Efisien**", di mana penggunaan sumber daya berimbang sepenuhnya dengan hasil yang diperoleh.

Faktor Keberhasilan

Efisiensi ini didorong oleh penerapan digitalisasi layanan kepegawaian yang memangkas biaya birokrasi serta ketepatan dalam perencanaan anggaran (budgeting) yang meminimalisir pemborosan pada pos-pos belanja pendukung.

Analisis Penyebab Sisa Anggaran (Efisiensi)

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.13 Analisis Sisa Anggaran (Efisiensi)

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Kinerja	Rata-Rata Capaian Keuangan	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	101,12	89,17	11,95
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	310,84	76,76	234,08
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	100,4	96,68	3,72

Meskipun capaian kinerja fisik mencapai **94,58%**, terdapat sisa anggaran sebesar **5,42%** yang tidak terealisasi. Hal ini tidak menghambat pencapaian target sasaran karena disebabkan oleh faktor-faktor teknis dan efisiensi sebagai berikut:

1. Efisiensi Melalui Pengadaan Barang dan Jasa (Sisa Tender) Sebagian besar sisa anggaran berasal dari selisih nilai antara Pagu Anggaran dengan Nilai Kontrak (HPS) pada kegiatan pengadaan sarana prasarana penunjang kantor. Adanya kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan memungkinkan BKD mendapatkan penyedia dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi spesifikasi teknis yang ditetapkan.

2. Optimalisasi Digitalisasi Layanan (*Paperless Policy*) Implementasi sistem informasi kepegawaian yang semakin masif di tahun 2025 mengakibatkan efisiensi pada pos belanja barang habis pakai (ATK) dan biaya penggandaan. Pengalihan dari dokumen fisik ke digital mengurangi kebutuhan anggaran operasional rutin secara signifikan.

3. Penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Rapat BKD melakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas melalui:

- Pemanfaatan koordinasi daring (Zoom/Virtual Meeting) dengan pihak BKN maupun instansi kabupaten/kota.
- Penerapan kebijakan perjalanan dinas yang lebih selektif dan berbasis skala prioritas, sehingga biaya akomodasi dan transportasi dapat ditekan namun koordinasi tetap berjalan efektif.

4. Faktor Efisiensi Belanja Pegawai dan Honorarium Adanya sisa anggaran pada pos belanja pegawai yang disebabkan oleh faktor alamiah, seperti:

- Adanya pegawai yang memasuki batas usia pensiun di tengah tahun berjalan.
- Selisih perhitungan tunjangan yang didasarkan pada realisasi kehadiran (presensi) pegawai yang sangat ketat, sehingga pembayaran dilakukan sesuai dengan hak riil di lapangan.

Dengan realisasi **94,58%** dan capaian kinerja yang **identik**, BKD Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan **kepatuhan administratif yang sangat tinggi**. Angka ini mencerminkan manajemen yang sangat disiplin dalam memastikan setiap rupiah yang dicairkan benar-benar telah selesai secara fisik.